

Pengaruh Aspek Sosial-Politik dan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

^a*Yuni Yuli Anti, ^bAli Anis

^{a,b} Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

***Korespondensi:** yuniyulianti209@gmail.com, alianis2911@yahoo.com

Info Artikel

Diterima:

2 April 2024

Disetujui:

16 April 2024

Terbit daring:

5 Mei 2024

DOI: -

Sitasi:

Anti, Yuni Yuli & Anis, Ali. (2024). Pengaruh Aspek Sosial-Politik dan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 13(1), 58-67.

Abstract

This research aims to determine the influence of socio-political and economic aspects on income inequality in Indonesia in 2017-2021. This research uses Fixed Effect Model (FEM) analysis using Stata 14. The results of research using panel data regression show that: 1). The social aspect proxied by education has an insignificant negative influence on income inequality in Indonesia. 2). Social aspects proxied by health have an insignificant negative influence on income inequality in Indonesia. 3). The political aspect proxied by the Indonesian democracy index has an insignificant positive influence on income inequality in Indonesia. 4). The economic aspect proxied by GRDP has a significant negative influence on income inequality in Indonesia. 5). Independent variables have a simultaneous or joint effect and are significant on the dependent variable.

Keywords: Education, Health, Indonesian Democracy Index, Economic Growth, Income Inequality

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan analisis *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan stata 14. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi data panel diperoleh bahwa: 1). Aspek sosial yang diproksikan oleh pendidikan memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. 2). Aspek sosial yang diproksikan oleh kesehatan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. 3). Aspek politik yang diproksikan oleh indeks demokrasi Indonesia memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. 4). Aspek ekonomi yang diproksikan oleh PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. 5). Variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama dan signifikan terhadap variabel dependen.

Kata Kunci : Pendidikan, Kesehatan, Indeks Demokrasi Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan

Kode Klasifikasi JEL: P20; P50; I30

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam kategori negara yang sedang berkembang dengan keberagaman karakteristik. Karakteristik wilayah yang beragam, menyebabkan berbagai perbedaan dalam persoalan menciptakan kesejahteraan penduduk. Perbedaan kesejahteraan penduduk di masing-masing daerah dapat menimbulkan gap. Oleh karena itu, Indonesia harus menciptakan pembangunan pada setiap daerah agar terciptanya kesejahteraan yang merata.

Pembangunan memiliki tujuan untuk mengatasi persoalan dalam negara agar terciptanya peningkatan taraf hidup bagi semua masyarakat. Namun kenyataannya, pembangunan dapat menciptakan perbedaan laju pertumbuhan antar daerah yang menyebabkan munculnya kesenjangan kemakmuran dan pertumbuhan antar daerah. Kesenjangan kemakmuran dan pertumbuhan antar daerah berkaitan dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang diperoleh masyarakat. Ketidakmerataan pendapatan tersebut dapat memicu dan menimbulkan kecemburuan dalam masyarakat yang kemudian memungkinkan terjadinya resiko besar seperti kerusuhan dan gerakan separatis (Windhu Putra, 2018). Ketimpangan pendapatan yang tinggi juga dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutannya. Oleh karena itu ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak dapat dikesampingkan karena dapat menjadi sumber terjadinya permasalahan baru.

Berdasarkan data pada bps terlihat bahwa terdapat jarak yang cukup lebar antara provinsi dengan nilai rerata ketimpangan tertinggi dan terendah, dimana nilai ketimpangan yang tertinggi sebesar 0.43 dan terendah yaitu sebesar 0.31. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan tersebut, menunjukkan bahwa belum maksimalnya pemerataan distribusi pendapatan di setiap daerah yang ada di Indonesia. Berdasarkan gambar 2 di atas terlihat bahwa terdapat tujuh provinsi yang memiliki nilai Rerata ketimpangan pendapatan di atas Rerata ketimpangan pendapatan nasional. Berdasarkan pemaparan tersebut, berarti ketimpangan yang terdapat di Indonesia masih perlu diperhatikan agar nilai ketimpangan tersebut dapat diturunkan ke nilai yang masih bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat.

Dalam indeks pembangunan manusia, pendidikan dapat digambarkan melalui rata-rata lama sekolah. Menurut Nisa & Samputra (2020) kedua indikator pendidikan tersebut diharapkan mampu mencerminkan tingkat pengetahuan atau pendidikan di Indonesia. Menurut (Kevin et al., 2022) rata-rata lama sekolah diartikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Menggunakan indikator rerata lama sekolah, akan diketahui banyaknya tahun standar seseorang dalam menamatkan pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan peningkatan indeks pendidikan, akan memberikan peluang pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi bagi banyak kelompok masyarakat sehingga akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Anshari et al., (2019) menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Artinya ketika pendidikan yang diukur dengan rerata lama sekolah mengalami peningkatan, maka ketimpangan pendapatan juga akan meningkat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, dilihat bahwa nilai rerata lama sekolah tertinggi dan terendah cukup lebar. Nilai rerata lama sekolah Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki nilai rerata indeks pendidikan tertinggi diantara 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian Provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki nilai rerata lama sekolah terendah diantara 34 provinsi di Indonesia. Provinsi dengan nilai rerata lama sekolah yang tinggi mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan pada daerah tersebut cukup baik. Sedangkan provinsi yang memiliki nilai rerata lama sekolah yang rendah mengindikasikan bahwa penduduk pada wilayah tersebut masih banyak yang belum memperoleh pendidikan yang seharusnya. Rendahnya tingkat pendidikan, dapat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan penduduk suatu wilayah yang pada akhirnya

belum dapat berpengaruh pada tingkat pendapatan yang diperoleh yang kemudian berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di suatu wilayah.

Menurut (Sugiyanto & Pamungkas, 2023) selain pendidikan, ketimpangan pendapatan juga dapat dipengaruhi oleh kesehatan. Menurut Pamungkas (2023) kesehatan dapat diukur menggunakan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Menurut WHO, Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui kualitas tingkat kesehatan masyarakat suatu wilayah. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan suatu wilayah dikarenakan dapat dijadikan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dalam peningkatan derajat kesehatan. Menurut UNDP dan BPS, nilai minimum UHH yaitu sebesar 20 dan nilai maksimumnya 85.

Hal mendasar yang menunjukkan keterkaitan antara kesehatan dengan tingkat pendapatan yaitu terletak pada perbedaan produktivitas. Masyarakat yang sehat akan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Menurut Todaro & Smith (2006) kesehatan memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja, tingkat produktivitas dan juga tingkat upah yang diterima oleh masyarakat.

Menurut (Arie & Sugianto, 2022) tingkat kesehatan yang diukur menggunakan indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti, ketika tingkat kesehatan meningkat maka tingkat ketimpangan pendapatan akan menurun. Begitupun sebaliknya.

Berdasarkan data dari BPS diketahui bahwa nilai Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) 34 provinsi di Indonesia dengan nilai tertinggi 74.90 dan nilai terkecil yaitu sebesar 64.81. Selain itu, diketahui pula bahwa terdapat sembilan provinsi yang memiliki nilai rerata UHH diatas rerata nasional. Provinsi dengan nilai rerata UHH di atas rerata nasional yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta.

Faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi tingkat ketimpangan di Indonesia menurut Zulkarnaen (2017) adalah indeks demokrasi. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh faktor politik dalam hal ini adalah indeks demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan pengukuran tingkat demokrasi yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan dan penerapan demokrasi yang ada di Indonesia. Semakin tinggi tingkat demokrasi, mengindikasikan bahwa sistem kontrol pemerintah, penegakkan hukum dan kinerja pemerintah termasuk dalam kategori baik.

Para ahli mengungkapkan bahwa demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat yang pada akhirnya akan memungkinkan lebih banyak orang untuk menuntut redistribusi pendapatan yang lebih adil. Ada banyak indikator dari segi politik, salah satunya indeks demokrasi Indonesia. Indeks demokrasi Indonesia merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi yang ada di Indonesia. Menurut bps, dalam pengukuran indeks demokrasi ada beberapa hal yang diteliti yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Menurut bps, dalam pengukuran indeks demokrasi ada beberapa hal yang diteliti yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Selain itu, indeks demokrasi Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga. Kelompok pertama yaitu indeks demokrasi dengan kategori baik, merupakan wilayah yang memiliki nilai indeks > 80. Kelompok ke dua yaitu kelompok dengan kategori sedang, yaitu wilayah yang memiliki nilai indeks 60-80. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu kelompok dengan kategori buruk, yaitu wilayah yang memiliki nilai IDI < 60.

Dengan demikian, semakin baik indeks demokrasi Indonesia maka akan berdampak terhadap peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan termasuk juga dalam memperoleh

pendapatan yang lebih adil. Menurut (Todaro & Smith, 2006) Tuntutan redistribusi yang lebih adil tersebut dapat melalui tuntutan intervensi beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pemerataan distribusi pendapatan. (Adib et al., 2019) mengungkapkan bahwa lembaga demokrasi memiliki peran untuk mengontrol jalannya kekuasaan, agar hak dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian akan menyebabkan keuntungan dalam politik maupun ekonomi. Para ahli mengungkapkan bahwa demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat yang pada akhirnya akan memungkinkan lebih banyak orang untuk menuntut redistribusi pendapatan yang lebih adil.

Menurut (Febriyani & Anis, 2021) faktor terakhir yang diduga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan di dalam suatu daerah dan juga sebagai penentu kebijakan pembangunan kedepannya. Berdasarkan penelitiannya, Febriyani menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan negatif. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Todaro & Smith (2011) menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan bisa saja dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi.

Aspek ekonomi merupakan gambaran keadaan perekonomian suatu negara. Aspek ekonomi dapat dilihat menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi. (Sukirno, 2016) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan di dalam perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Kuznets dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hubungan atau korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan adalah kuat. Pada saat dimulainya pertumbuhan ekonomi pada tahap awal, tingkat ketimpangan akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan distribusi pendapatan yang belum merata. Kemudian pada tahapan yang lebih lanjut, tingkat ketimpangan akan mengalami penurunan. Pola peningkatan penurunan tersebut digambarkan Kuznets setelah meneliti berbagai negara dengan metode U terbalik.

Pendapatan nasional atau PDRB biasanya terbagi menjadi PDRB harga berlaku dan harga tetap. PDRB harga berlaku merupakan nilai barang dan jasa pada suatu negara dalam suatu tahun yang diukur atau dihitung menggunakan harga yang berlaku di tahun tersebut. Sedangkan PDRB harga tetap merupakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya untuk mengukur barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun lainnya (Sukirno, 2016).

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari perolehan nilai PDRB dan nilai gini rasio. Terlihat bahwa PDRB tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara dengan nilai PDRB yang tergolong tinggi tersebut memiliki nilai gini rasio yang termasuk dalam kategori rendah.

Sedangkan untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat meskipun memiliki nilai PDRB yang termasuk dalam kategori tinggi di antara 34 provinsi di Indonesia, justru memiliki gini rasio yang termasuk dalam kategori tinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma Dwi et al., 2019).

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Todaro & Smith (2011) ketimpangan pendapatan adalah perbedaan distribusi pendapatan yang diterima atau yang dihasilkan oleh suatu masyarakat yang cukup mencolok dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Ketimpangan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikurangi ke tingkat yang bisa diterima oleh sistem sosial tertentu. Oleh karena itu, masalah ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara baik negara yang sedang berkembang maupun negara

maju sekalipun. Namun biasanya, yang membedakannya adalah besaran angka ketimpangan yang terdapat pada tiap negara.

Perkembangan ketimpangan pendapatan di Indonesia selama lima tahun terakhir diukur menggunakan indeks gini. Indeks gini tersebut menggambarkan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah yang berkisar antara 0 hingga 1. Dimana indeks gini yang mendekati angka 0 menunjukkan bahwa semakin kecil tingkat ketimpangan pendapatan, dan jika mendekati angka 1 maka menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi (Todaro & Smith, 2011).

Tingkat ketimpangan suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok. Kelompok pertama yaitu merata sempurna apabila bila suatu wilayah memiliki nilai indeks gini $X = 0$. Kelompok kedua yaitu kelompok tingkat ketimpangan rendah adalah wilayah yang memiliki nilai indeks gini $0 < x < 0.4$. Kemudian kelompok ke tiga yaitu tingkat ketimpangan sedang yaitu apabila nilai indeks gini suatu wilayah berkisar antara $0.4 < x < 0.5$. Lalu kelompok yang ke empat adalah tingkat ketimpangan tinggi yaitu wilayah yang memiliki nilai indeks gini yang berkisar antara 0.5 hingga < 1 . Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok ketimpangan sempurna (dikuasai satu pihak) yaitu wilayah yang memiliki nilai indeks gini $x=1$.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan kedalam data Panel. Data Panel adalah data yang bersifat time series dan cross section. Tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 sampai 2021. Data dalam penelitian ini di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Model analisis yang dipakai adalah model analisis data Panel.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ketimpangan Pendapatan yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ketimpangan pendapatan diukur dengan menggunakan indikator Persentase Menurut Provinsi dari tahun 2017 sampai 2021. Di Indonesia

Variabel Independen adalah pendidikan, kesehatan, indeks demokrasi, pertumbuhan ekonomi. Adapun model regresi dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana Y adalah Ketimpangan Pendapatan, α adalah konstanta, β_1 - β_4 adalah koefisien regresi, x_1 adalah pendidikan, x_2 adalah kesehatan, x_3 adalah indeks demokrasi, x_4 pertumbuhan ekonomi. ε adalah error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan model terbaik dalam regresi panel data dilakukan melalui pengujian model. Uji *Chow* bertujuan untuk memilih model antara *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Uji *Chow* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari taraf nyata sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect*. Karena model yang terpilih *Fixed effect* maka dilakukan uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara *random effect* atau *fixed effect*. Hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari taraf nyata sehingga model yang terpilih model *random effect*. Terakhir dilakukan uji *lagrange multiplier* untuk menentukan model antara *common effect* atau *random effect*. Hasil uji *lagrange multiplier* menunjukkan bahwa nilai probabilitas kecil dari taraf nyata

sehingga model yang terpilih adalah *random effect*. Berdasarkan hasil uji *chow*, uji hausman dan uji *lagrange multiplier*, model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Berikut Tabel 1 yang menunjukkan hasil regresi panel dengan *Fixed Effect Model*.

Tabel 1.
Hasil Estimasi Random Effect Model

```

. xtreg Ig logrls loguhh logpdrb idi, fe
Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =    170
Group variable: prov                  Number of groups =    34

R-sq:                                  Obs per group:
    within = 0.3234                     min           =     5
    between = 0.0508                     avg           =    5.0
    overall = 0.0441                     max           =     5

corr(u_i, Xb) = -0.9460                  F(4,132)        =    15.77
                                          Prob > F        =    0.0000

```

	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
logrls	-.0133177	.2022414	-0.07	0.948	-.4133712	.3867357
loguhh	-.7412469	1.089511	-0.68	0.497	-2.896408	1.413914
logpdrb	-.1840341	.0463777	-3.97	0.000	-.2757738	-.0922944
idi	.0000707	.000234	0.30	0.763	-.0003922	.0005336
_cons	3.232828	1.740136	1.86	0.065	-.2093333	6.67499
sigma_u	.11376349					
sigma_e	.00892037					
rho	.9938892	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(33, 132) = 82.21 Prob > F = 0.0000

Sumber: output stata14 Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, kesehatan berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, indeks demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 32,34 artinya Pendidikan, Kesehatan, indeks demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh 32 persen terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

1. Pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa pendidikan (X_1) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.013 dan nilai signifikansi sebesar 0.948 . Berdasarkan temuan tersebut, berarti setiap kenaikan ataupun penurunan pada tingkat pendidikan belum mampu mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang ada.

Menurut Todaro & Smith, (2011) perbaikan pada tingkat pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan memudahkan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Pendidikan diyakini mampu meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, maka keahlian dan keterampilan yang dimiliki akan semakin matang dan juga akan mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Selain itu, mereka yang menempuh pendidikan tinggi dapat memilih bidang pekerjaan dan juga memilih gaji yang lebih tinggi. Teori *Human Capital* (Jhingan, 2012:414) menjelaskan bahwa pembentukan manusia bisa diartikan sebagai suatu proses peningkatan jumlah penduduk yang memiliki skill, pendidikan dan pengalaman yang pada akhirnya akan menentukan tingkat pembangunan dan politik suatu negara.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anshari et al., 2019) yang menemukan bahwa pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan

pendapatan di Indonesia. Selain itu, juga ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto & Pamungkas, (2023) yang menemukan pendidikan yang diprosikan oleh rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diperlukannya beberapa implikasi kebijakan oleh pemerintah agar pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Beberapa kebijakan yang dapat diambil yaitu melakukan perluasan akses pendidikan pada semua lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin. Kemudian perlunya pemerintah untuk meninjau kembali terkait dengan penerima jaminan pendidikan seperti kartu Indonesia pintar (KIP) agar tepat sasaran. Sehingga masyarakat bisa memperoleh kemudahan dan keringanan dalam menempuh pendidikan terutama untuk masyarakat golongan bawah. Lalu pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran terkait dengan pendidikan. Pemerintah juga perlu menggalakkan program non formal seperti paket A,B dan C agar masyarakat yang putus sekolah memperoleh kemudahan dalam melanjutkan pendidikannya kembali. Dengan beberapa kebijakan tersebut, maka setiap lapisan masyarakat akan memperoleh keterampilan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

2. Pengaruh Kesehatan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa kesehatan (X_2) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.741 dan nilai signifikansi sebesar 0.497 . Hal ini berarti setiap kenaikan maupun penurunan pada tingkat kesehatan belum mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang ada.

Menurut Todaro & Smith, (2011) selain perbaikan pada tingkat pendidikan, perbaikan pada tingkat kesehatan juga akan meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan memudahkan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Hal mendasar yang menunjukkan keterkaitan antara kesehatan dengan tingkat pendapatan yaitu terletak pada perbedaan produktivitas. Masyarakat yang sehat akan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Menurut Todaro & Smith (2006) kesehatan memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja, tingkat produktivitas dan juga tingkat upah yang diterima oleh masyarakat.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan dalam penelitian Arie & Sugianto, (2022) yaitu tingkat kesehatan yang diukur menggunakan indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa diperlukannya beberapa implikasi kebijakan oleh pemerintah agar kesehatan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Beberapa kebijakan yang dapat diambil yaitu melakukan perluasan akses kesehatan pada semua lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin. Kemudian perlunya pemerintah untuk meninjau kembali terkait dengan penerima jaminan kesehatan seperti kartu Indonesia sehat (KIS) agar tepat sasaran. Sehingga masyarakat bisa memperoleh kemudahan dan keringanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Lalu pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran terkait dengan kesehatan. Pemerintah juga perlu menggalakkan beberapa program terkait dengan peningkatan dan pemerataan kesehatan bagi tiap lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin. Beberapa program tersebut yaitu yang pertama, jaminan persalinan (Jampersal) dalam hal mengupayakan penurunan angka kematian ibu dan anak baru lahir. Kedua, program keluarga harapan (PKH) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak-anak 0-6 tahun sekaligus sebagai upaya untuk mencegah stunting. Ketiga, program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) agar masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan beberapa kebijakan tersebut, maka akan terciptanya pemerataan kesehatan bagi semua golongan masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak hanya dapat diakses oleh masyarakat golongan atas saja, melainkan masyarakat golongan bawah juga akan memperoleh pelayanan yang sama. Dengan demikian,

perbaikan kualitas kesehatan pada semua lapisan masyarakat tersebut akan mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan.

3. Pengaruh Indeks Demokrasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa indeks demokrasi Indonesia (X_3) memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.0001 dan nilai signifikansi sebesar 0.763. Hal ini berarti setiap kenaikan indeks demokrasi Indonesia belum mampu mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan. Kenaikan indeks demokrasi tidak akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang ada.

Hasil temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaen, (2017) yang menemukan indeks demokrasi Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dia berpendapat bahwa retribusi pendapatan tidak langsung terpengaruh setelah adanya demokrasi. Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bariyah, (2022) yang menemukan bahwa di sebagian penelitiannya terdapat hubungan positif signifikan indeks demokrasi Indonesia terhadap ketimpangan pendapatan.

Pada dasarnya demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat yang pada akhirnya akan memungkinkan lebih banyak orang untuk menuntut retribusi pendapatan yang lebih adil. Sehingga ketidakmampuan demokrasi dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa hal salah satunya tidakampunya pemerintah untuk mewujudkan dan menerapkan kebijakan retribusi yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu meralisasikan kebijakan retribusi yang diinginkan masyarakat yang berkaitan dengan ketimpangan. Beberapa kebijakan tersebut yang pertama, kebijakan yang terkait dengan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial yang dimaksudkan yaitu terkait dengan pemerataan pendidikan dan kesehatan. Pemerataan pendidikan dan kesehatan tersebut dimaksudkan agar masyarakat miskin dan tertinggal dapat merasakan kesempatan yang sama dengan masyarakat kaya dan golongan menengah ke atas dalam hal pendidikan dan kesehatan. Yang ke dua, pemerintah juga perlu merealisasikan kebijakan terkait dengan pemerataan pembangunan pada setiap daerah. Pemerataan pembangunan akan memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan perekonomian. Dan yang ke tiga, kebijakan terkait dengan penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan. Penciptaan serta perluasan lapangan pekerjaan akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh pendapatan.

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa aspek ekonomi yang diprosikan oleh PDRB (X_4) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.184 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Hal ini berarti setiap kenaikan pada PDRB sebesar satu satuan, maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.184.

Sukirno, (2016) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan di dalam perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu alat yang mengukur perkembangan perekonomian suatu negara. Salah satu alat ukur yang tepat yang dapat digunakan yaitu berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor produksi yang dimiliki warga negara dalam satu tahun tertentu. Data pendapatan nasional suatu negara memiliki kegunaan penting yaitu untuk melihat pencapaian pertumbuhan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan pengamatan tersebut akan dapat dinilai keberhasilan suatu negara dalam mengendalikan kegiatan perekonomian dalam jangka pendek dan usaha jangka panjang

dalam mengembangkan perekonomiannya. Dengan demikian, maka semakin besar nilai PDRB suatu negara maka mencerminkan keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif lain, Kuznes dalam Todaro (2011: 278) mengaitkan persoalan ketimpangan pendapatan dengan tahapan pembangunan yang dirumuskan dalam hipotesis "U-terbalik". Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan akan menunjukkan kenaikan dan cenderung memburuk dan kemudian akan membaik dengan menurunnya ketimpangan. Bentuk "U-terbalik".

Walaupun dalam penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan pada PDRB akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, pemerintah juga masih perlu meningkatkan beberapa kebijakan agar pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan lebih besar. Kebijakan tersebut dapat berupa pemerataan pembangunan pada daerah tertinggal dan daerah timur. Pemerataan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur akan meningkatkan investasi yang pada akhirnya akan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Lapangan pekerjaan yang lebih luas akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan.

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa aspek sosial, aspek politik dan aspek ekonomi secara bersama-sama memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai koefisien regresi 0.3234 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Hal ini berarti 32.34% variasi ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel pendidikan, kesehatan, indeks demokrasi dan PDRB. Sedangkan 67,66% dipengaruhi oleh selain dari variabel dalam penelitian ini.

Dalam penelitian (Anshari et al., 2019) variabel yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu upah minimum provinsi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini berarti peningkatan pada upah minimum provinsi akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

Kemudian dalam penelitian (Kusuma Dwi et al., 2019) variabel yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu inflasi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. Hal ini berarti peningkatan pada inflasi maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di D.I Yogyakarta dikarenakan, kondisi inflasi di D.I Yogyakarta baik di kabupaten/kota masih berada di tahap normal dan dalam kondisi yang kondusif. Inflasi yang terkendali memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan inflasi mampu memberikan semangat kepada pengusaha, karena dengan kenaikan harga yang ringan para pengusaha mendapatkan lebih banyak keuntungan sehingga para pengusaha lebih meningkatkan produksinya, peningkatan produksi tersebut berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sehingga peningkatan inflasi berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pendidikan (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Kesehatan (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Indeks demokrasi (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi (x4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2015). Democracy, redistribution, and inequality. In *Handbook of Income Distribution* (1st ed., Vol. 2). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59429-7.00022-4>
- Adib, A., Idris, I., & Triani, M. (2019). Analisis Pengaruh Demokrasi, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11519657.00>
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4990>
- Bariyah, N. (2022). Demokrasi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 53–64. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.23071>
- Ekanada, M. (2016). *analisis ekonometrika data panel* (2nd ed.). mitra wacana media.
- Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(4), 9. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i4.12375>
- Islami, novita nurul. (2022). *Modul Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan*.
- Kevin, A. valiant, Bhinadi, A., & Syari'udin, A. (2022). Pengaruh Pdrb, Angka Harapan Hidup, Dan Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2959–2968. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.482>
- Kusuma Dwi, S. D., Sarfiah Nur, D. S., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Inflasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *Ekonomi*, 1(3), 282–293.
- Nisa, N. S., & Samputra, P. L. (2020). Analisis Ketimpangan Pendidikan di Provinsi Papua Barat (Analysis of Education Inequality in West Papua Province). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(2), 115–135.
- Nuraini, E. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan Di Wilayah Gerbangkertosusila. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 5(1), 52. <https://doi.org/10.26740/jepk.v5n1.p52-67>
- Sugiyanto, S., & Pamungkas, A. A. (2023). *Analysis Of The Influence Of Education, Health And Productivity On Income Inequality In 34 Provinces In Indonesia (2015-2021)*. 17(2), 81–94.
- Sugiyono. (2019). *metode penelitian kuantitatif kualitatif* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). 2019.
- Sukirno, S. (2016). *makroekonomi* (2nd ed.). Rajagrafindo Persada.
- Todaro, M., & Smith, S. (2006). *pembangunan ekonomi* (1st ed.). 2006.
- Todaro, M., & Smith, S. (2011). *pembangunan ekonomi* (A. Maulana & novietha indra Sallama (eds.); 11th ed.). erlangga.
- Windhu Putra, L. R. (2018). Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1st ed.). rajawali pers.
- Yang, J., & Qiu, M. (2016). The impact of education on income inequality and intergenerational mobility. *China Economic Review*, 37, 110–125. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2015.12.009>
- Zulkarnaen, I. (2017). Socio-Political and Economic Determinants of Income Inequality in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(3), 224–239. <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.21>